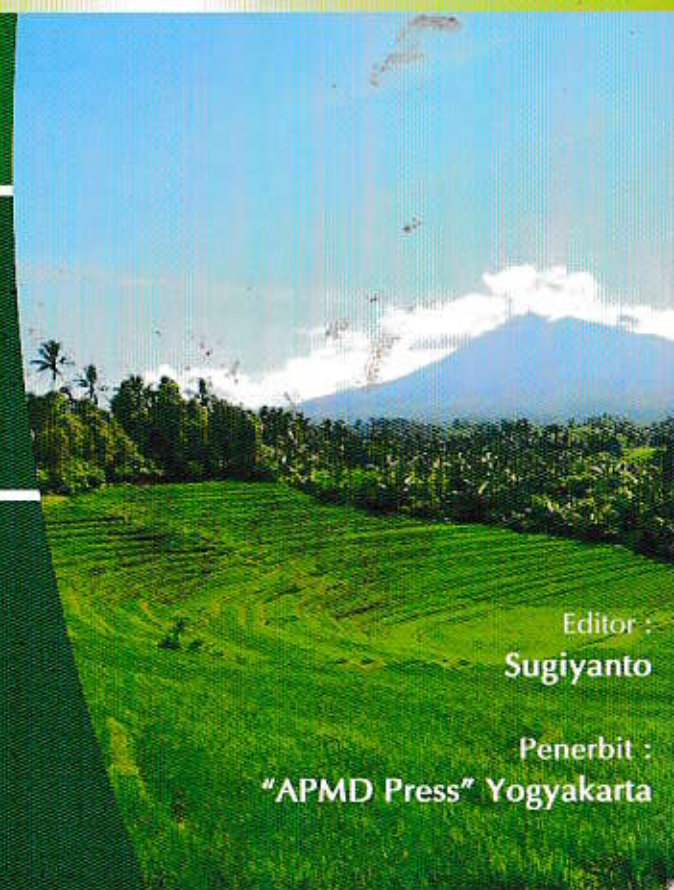


# Bergerak Menuju Desa dan Dari Desa Bergerak



Editor :  
Sugiyanto

Penerbit :  
"APMD Press" Yogyakarta

---

**Tim Penyusun**

Bergerak Menuju Desa dan Dari Desa Bergerak

Editor : Sugiyanto

Edisi 1 - Yogyakarta : Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa  
"APMD" Yogyakarta 2010

xii + 200 hlm : 15 x 21 cm

ISBN : 978-979-97550-5-6

---

Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-undang

Diterbitkan oleh

**"APMD Press" Yogyakarta**

Cetakan Pertama : Januari 2010

**Tim Penyusun**

1. Sugiyanto
2. Hendra Alfani
3. Kisno Hadi
4. Sutoro Eko
5. Robert B. Baowollo
6. Setyadi
7. M. Baiquni
8. Fajar Sudjarwo
9. Rosalia Widiastuti Sri Lestari

ISBN : 978-979-97550-5-6



## PENGANTAR EDITOR

Desa merupakan bagian aras lokal, yang selama ini desa menjadi perhatian banyak subyek, tetapi kondisi desa saat ini tak banyak berubah, bahkan secara fisik desa-desa di negeri ini semakin hari akan semakin menyempit karena tekanan fisik kota sehingga laju pertumbuhan desa dengan kota masih terdapat ketimpangan. Disisi lain desa menjadi salah satu indikator keberhasilan pembagunan daerah pada tingkat kabupaten dan propinsi.

Atas itu pertanyaan yang perlu dicari jawabannya adalah "mengapa pembangunan desa yang dimulai sejak era orde lama tetapi sampai saat ini desa-desa di Indonesia perubahannya belum berpihak kepada masyarakat desa?" Mengapa pertanyaan itu masih muncul sampai hari ini ?. Jawaban atas pertanyaan di atas kemungkinan dalam pelaksanaan pembangunan desa dan masyarakat desa terjadi kesalahan strategi, ketidak tepatan sasaran, salah menentukan metode, kurang akuratnya data, salah didalam menentukan akar masalah, terjadi kealpaan atas potensi dan sumberdaya desa serta kesalahan didalam memilih subyek pembangunan atau pembangunan desa yang dilaksanakan setengah hati.

Buku berjudul "Bergerak Menuju Desa dan Dari Desa Bergerak" mencoba mengurai dan memberikan alternatif jawaban atas pernyataan di atas. Buku yang sederhana ini merupakan kumpulan artikel yang dihimpun dari materi seminar Diesnatalis STPMD "APMD" ke 44 pada tahun 2009, makalah-makalah lepas yang memiliki kesamaan ruh dari tema seminar yang ditulis para alumni STPMD "APMD" serta satu artikel hasil seminar program studi ilmu Sosiatri tentang Multikulturalisme

dari tatanan nation-state, maka perspektif struktural harus dipandang sebagai bagian dari penyebab terjadinya kemiskinan dan keterbelakangan desa. Dan dalam buku ini para penulis, melakukan kajian historis tentang peta pembangunan pedesaan dalam konteks urbanisasi dan globalisasi, guna meneropong perubahan desa dan kota serta pengaruh paham pembangunan (developmentalisme) terhadap desa. Uraian atas kajian tersebut juga memberikan manfaat bagi pembaca untuk mengetahui berbagai probematika desa dalam konteks pembangunan dan globalisasi, karena dalam bab-bab terakhir buku ini, para penulis secara kritis mengkaji dan menguraikan tentang reposisi peran dan fungsi desa serta sentimen pemuda terhadap desa. Suatu akhiran penulisan yang kritis dan dialektis, yang menurut kami mempertegas standing position desa dalam menentukan alur gerakannya, yaitu "Bergerak Menuju Desa dan Dari Desa Bergerak".

Mudah-mudahan dengan diterbitkannya buku ini, akan mempersolid gerak menuju desa, sehingga wawasan dan pengetahuan tentang desa akan menggiring kita untuk berada di tengah desa dan bersama warga desa, dari desa kita bergerak, menuju perubahan dan perbaikan yang signifikan.

Demikian sambutan kami, Insha' Allah semoga Tuhan Yang Maha Kuasa akan menggerakkan kita semua untuk berbuat bijak demi kebajikan, dan semoga karya tulis ini akan bermanfaat bagi tercapainya gerak menuju desa dan dari desa kita bergerak, sehingga tercapainya desa membangun, dan sejahtera.

Yogyakarta, Januari 2010

Ketua STPMD "APMD" Yogyakarta

Drs. Soemardjono, M.Si.

## DAFTAR ISI

PENGANTAR EDITOR .....	iii
PENGANTAR KETUA STPMD "APMD" .....	vii
DAFTAR ISI .....	xi

<b>DESA: DARI ROMANTISME DAN KETERBELAKANGAN, MENUJU PEMBERDAYAAN DAN KEMANDIRIAN .....</b>	<b>1</b>
A. Prawacana .....	2
B. Mendekati Desa; Analisis Situasi .....	3
C. Konteks Percepatan Pemberdayaan Desa .....	6
D. Mewujudkan Pemberdayaan dan Kemandirian Desa; Peluang dan Tantangan .....	8
E. Purnawacana .....	10
F. Daftar Pustaka .....	12

<b>MEMPERKUAT STRUKTUR EKONOMI POLITIK DAN SOSIAL PEDESAAN .....</b>	<b>13</b>
A. Pendahuluan .....	14
B. Isu Penting Ekonomi Politik Dan Sosial Pedesaan .....	20
C. Penutup .....	58
D. Daftar Pustaka .....	61

<b>MEMPERSATUKAN RUU DESA DAN RUU PEMBANGUNAN PERDESAAN .....</b>	<b>65</b>
A. Konsep Dasar .....	68
B. Perbandingan Dua RUU .....	71
C. Beberapa Usulan .....	78

<b>MULTIKULTURALISME DAN POLITIK IDENTITAS PASCA-REFORMASI .....</b>	<b>81</b>
A. Konsep Dan Problem Multikulturalisme .....	83
B. Multikulturalisme Dan Prinsip Kesetaraan Kewargaan .....	89
C. Reformasi Dan Politik Identitas Post-colonial .....	94
D. Politik Identitas, <i>Social Capital</i> , Dan <i>Communitybased Sustainability Deveopment</i> .....	97

E. Daftar Pustaka .....	103
<b>PENGALAMAN EMPIRIS MEMBANGUN DESA KABUPATEN</b>	
<b>PURBALINGGA.....</b>	<b>107</b>
A. Sekilas Purbalingga.....	109
B. Penanggungan Kemiskinan .....	118
C. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan .....	120
D. Pembangunan Ekonomi.....	127
E. Penutup .....	133
F. Daftar Pustaka .....	133
<b>PETA PEMBANGUNAN PERDESAAN DALAM KONTEKS</b>	
<b>URBANISASI DAN GLOBALISASI .....</b>	<b>135</b>
A. Pendahuluan .....	136
B. Tinjauan Sejarah Perubahan Desa dan Kota .....	138
C. Pengaruh Paham Pembangunan .....	141
D. Penutup .....	152
E. Referensi .....	153
<b>PROBLEMATIKA DESA DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN</b>	
<b>DAN GLOBALISASI.....</b>	<b>155</b>
Problematika Desa Dalam Konteks Pembangunan Dan	
Globalisasi .....	156
<b>REPOSISI PERAN DAN FUNGSI DESA .....</b>	<b>171</b>
A. Pendahuluan .....	172
B. Termajinalkan .....	173
C. Reposisi Fungsi dan Peran Desa .....	176
E. Daftar Pustaka .....	179
<b>SENTIMEN PEMUDA TERHADAP DESA .....</b>	<b>181</b>
A. Pendahuluan .....	184
B. Pembahasan .....	189
C. Penutup .....	197
D. Daftar Pustaka .....	199

## **DESA: DARI ROMANTISME DAN KETERBELAKANGAN, MENUJU PEMBERDAYAAN DAN KEMANDIRIAN**

(Catatan Kecil Mengelola Program Pemberdayaan  
Masyarakat dan Penguatan Tata Kelola Pempdes)

**Oleh: Hendra Alfani**

*Dosen Fakultas Fisipol  
Universitas Baturaja, OKU*

# **SENTIMEN PEMUDA TERHADAP DESA**

Oleh : Sugiyanto

Sengaja penulis sajikan cuplikan artikel dibagian depan sebelum pendahuluan dengan maksud agar para pembaca mudah memahami isi dari judul di atas, artikel berjudul "Memberdayakan Desa Dengan Uang Receh" merupakan salah satu ruh dari sebuah gerakan pembangunan Bergerak Dari Desa dan Bergerak Menuju Desa. Harapan penulis para pembaca dapat memahami mengapa pemuda bersikap sintimen terhadap desa, di sisi lain pemuda memiliki fungsi akurat bagi desa dan desa memiliki fungsi dominan dalam keberlanjutan bangsa.

Desa Wonokerto kecamatan Turi kabupaten Sleman "memberdayakan desa dengan uang receh" singkat cerita : uang logam pecehan Rp 100, kini nyaris tak ada nilainya, sering dibiarkan hilang atau berserakan dimana-mana. Banyak yang belum sadar jika koin-koin itu dikumpulkan nilai dan manfaatnya sangat besar. Warga Wonokerta sejak Agustus 2009 mencanangkan gerakan menabung koin seratus rupiah, sasarannya adalah anak-anak petani. Pengelola gerakan tabungan ini adalah pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) "Wonomakmur" Wonomakmur mengelola 13 kelompok tani dengan jumlah anggota 263 petani.

## **Mekanisme kerja Wonomakmur :**

1. Membuat kotak tempat uang receh, kotak dibagikan kepada setiap anggota kelompok tani.
2. Apabila dirumah para anggota kelompok tani memiliki uang receh yang nilainya dianggap remeh oleh para petani misalnya Rp 150 kembalian belanja diwarung, maka uang tersebut dimohon untuk diberikan kepada anaknya atau dia lakukan sendiri . Anak tersebut atau dirinya wajib memasukan uang tersebut kedalam kotak yang posisinya terkunci/tertutup.
3. Setiap bulan petugas Wonomakmur keliling dari rumah ke

rumah untuk mengambil uang receh tersebut.

4. Proses pengambilan uang receh di setiap rumah harus melibatkan anak yang menabung dan orang tua, jadi ketika petugas datang anak diminta membuka kotak kemudian uang dihitung bersama dengan orang tuanya, setelah mengetahui jumlahnya uang tersebut diserahkan petugas Wonomakmur, oleh petugas uang dicatat dalam buku tabungan. Dan buku tersebut diserahkan kepada anak/orang tua.
5. Setelah petugas selesai keliling mengambil uang receh dari rumah ke rumah maka mereka berkumpul dan menghitung keseluruhan uang, setelah diadministrasi dengan baik maka uang tersebut diputar untuk dipinjamkan kepada para petani sebagai anggota Gapoktan yang membutuhkan tambahan modal.
6. Jika uang tersebut sisa atau tidak ada yang meminjam maka uang tersebut dimasukan ke rekening Wonomakmur di sebuah bank, sehingga tidak ada istilah uang berhenti jadi uang selalu berputar.

Pada awalnya rata-rata tabungan anak per bulan berkisar Rp 2.000;-3.000; atas kepercayaan anggota tabungan mereka setiap bulan meningkat bahkan ada anggota yang mencapai Rp 500.000/bulan.

Dari Rp 2.000;-3.000; dapat berkumpul sekiatar Rp 5.000.000;-6.000.000; tetapi sekarang mencapai belasan juta bahkan pernah di atas Rp 20.000.000;/bulan.

Gerakan menabung seratus rupiah bertujuan untuk :

1. Membantu permodalan petani salak, setiap petani berhak mendapatkan pinjaman paling rendah Rp 1.000.000; dengan masa pengembalian sepuluh bulan, Mereka dikenakan biaya administrasi 0,5%, biaya pelayanan 0,5%, dana resiko 1%, simpanan wajib pinjaman 1% dan bunga 1%/bulan.

Dana resiko dialokasikan untuk : a). membantu biaya pengobatan bila ada anggota petani yang sakit, setiap bantuan sebesar Rp 25.000;/tahun., b). Menutup kredit anggota yang meninggal.

2. Membantu biaya pendidikan anak petani : a). setiap tahun ajaran baru anggota yang memiliki anak naik kelas boleh mengambil tabungannya maksimal 30% dari saldo tersisa., b). Petani yang memiliki anak lulus SD/SMP/SMA boleh mengambil semua tabungan dengan menyisakan Rp 10.000;

Gerakan tabunagn uang seratus ini diluncurkan bersamaan dengan pemberian hibah Rp 100.000.000; dari pemerintah kepada Gapoktan, dan Gertus saat ini telah mengumpulkan tabungan Rp 180.000.000;

Karena model pemberdayaan ini dipandang tidak memberatkan anggota, positif dan menguntungkan, maka ibu-ibu pada wilayah yang sama akan meluncurkan gerakan tabungan uang kertas seribu. Sumber : Sudariyanto 2009:11

Pelajaran berharga dari artikel di atas mampu mengubah pola pikir pemuda desa Wonokerta yang dulunya menjadi pekerja swasta di kota (perantau) setelah mengetahui kisah sukses kelompok tani dari keluarganya cenderung berkeinginan pulang memilih jadi petani. Mereka tidak malu menjadi petani bahkan menjadi buruh tani pada petani salak pondoh, disisi lain mereka memiliki kebanggaan mampu membangun jati diri melalui media sumberdaya alam lokal yang ada di desanya. Setelah pemuda ikut terjun dalam pengelolaan petani salak podoh desa Wonokerta tidak saja menjual salak tetapi juga menjual bibit salak ke luar pulau Jawa serta ekspor salak ke Cina.

## A. Pendahuluan

“Jas merah “ kalimat pendek yang sering terucap dengan lantang dan keras oleh presiden pertama pada setiap mengawali pidatonya. Jas merah akronim dari “jangan lupa sama sejarah”, fakta menunjukkan bahwa nusantara mampu berubah nama menjadi Republik Indonesia di tandai dengan Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan jembatan emas bagi komponen seluruh rakyat Indonesia, Kemerdekaan sebagai upaya pembebasan seluruh rakyat atas mobilisasi para pahlawan yang telah berupaya melawan dan mengusir penjajah. Dalam berbagai literatur dapat kita temukan andil masyarakat desa khususnya golongan muda didalam membantu para pejuang sangat berarti, bentuk andil masyarakat desa pada

waktu itu antara lain memberikan bantuan makan minum sekedarnya, rumah atau tempat tinggalnya diperbolehkan sebagai tempat persembunyian dan tempat istirahat, membantu membuatkan senjata bambu runcing serta meminjamkan atau memberikan peralatan ala kadarnya yang dipergunakan untuk kepentingan melawan penjajah. Atas budi baik dan kemaun masyarakat desa untuk bergabung bersama para pejuang, berimplikasi terhadap usaha para pejuang dalam mewujudkan kemerdekaan. Jadi peran masyarakat desa pada masa penjajahan sangat bermakna bagi perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Tetapi pada saat ini banyak stakeholder bangsa yang sintimen terhadap desa, hal ini dapat kita lihat berbagai peristiwa yang tidak pro dengan keberadaan desa, bahkan desa selalu dipandang sebelah mata.

Berdasarkan wacana di atas desa memiliki tiga peran penting yaitu 1). Desa dari aspek sumberdaya manusia. Data statistik menunjukkan bahwa penduduk Indonesia dominan tinggal tinggal diperdesaan, artinya desa-desa di Indonesia merupakan penyangga sumberdaya manusia bagi bangsa dan negara, atas hal ini seharusnya pengadaan fasilitas publik lebih banyak di desa dari pada di perkotaan sebab wilayah perkotaan lebih sempit dibanding wilayah perdesaan. Tetapi kenyataan bahwa penyediaan fasilitas publik anatar desa dan kota belum seimbang dan dominan berada di perkotaan. 2). Desa sebagai tempat produksi sumberdaya alam, hampir semua kekayaan alam bangsa Indonesia berada di desa, seperti sumberdaya air bersih, aneka tambang, bahan makanan, bahan bangunan, dalin sebagainya semua diproduksi di desa. Atas itu desa memiliki peran penting dan startegis tetapi banyak pihak yang belum bekerja sama dengan desa dalam kontek simbiosis mutualisme, tetapi justru bekerjasama yang dikembangkan oleh banyak pihak merugikan desa, sebab kerjasamanya bersifat patron klien oleh pihak tertentu bahkan desa menjadi jajahan bagi sebagian masyarakat kota melalui produk dan kebijakannya. Bahkan desa selama ini hanya disusu oleh pihak eksternal tetapi desa tidak pernah diberi gizi yang baik agar susunya semakin baik. 3). Dalam tata pemerintahan desa memiliki kekuatan hukum yang berbeda dengan kota, perspektif hukum memandang desa di Indonesia memiliki kekuatan hukum formal yang seharusnya pihak eksternal tidak boleh bersikap semena-mena apalagi apatis dan sintimen. Undang-undang tentang desa menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat



hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Begitu agungnya nama "desa" yang memiliki kekuatan hukum dan kekuatan moral, atas itu seharusnya masyarakat yang bertempat tinggal di desa lebih bangga dibanding masyarakat yang bertempat tinggal diluar desa. Sebagai konsekuensinya masyarakat yang bertempat tinggal di desa mempunyai kewajiban untuk merawat, melestarikan dan memanfaatkan semua sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan lingkungan setempat.

Dalam sejarah menunjukkan bahwa kekuatan hukum dan moral telah melekat sejak jaman pemerintahan Belanda bukan saja lahir di era kemerdekaan bangsa Republik Indonesia tetapi sampai pada era global desa-desa di Indonesia banyak ditinggalkan oleh para generasi penerus bangsa terutama para pemuda. Jika kita sadari bahwa desa sebagai cikal bakal kota yang memiliki sumberdaya alam dan sumberdaya lain yang jumlahnya tidak terbatas amatlah malangnya jika tidak mendapat perhatian cukup oleh stakeholders internal dan eksternal. Lebih menderita lagi jika banyak pihak yang sentimen terhadap keberadaan desa. Sentimen merupakan perasaan membenci atau tidak senang (Bambang :1999: 294) Pelampiasan sentimen terbukti desa-desa dalam wilayah NKRI banyak ditinggalkan oleh kelompok manusia yang berusia produktif.

Kecenderungan penduduk yang tinggal di desa rata-rata anak balita dan anak usia sekolah dalam kategori wajib belajar sembilan tahun dan kelompok usia lanjut. Apabila kita ketemukan penduduk usia produktif yang tinggal di desa secara kualitatif tidak ada 30% dari total penduduk yang tinggal di desa tersebut. Mereka yang tetap tinggal didesa memiliki alasan yang kurang atau tidak ada kaitannya terhadap wacana pengembangan desa, alasan tersebut antara lain : a). Karena mereka mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu seperti menunggu orang tua atau keluarga yang sudah lanjut usia, kewajiban bergotongroyong atau menghadiri upacara-upacara tradisional., b). tidak mendapat ijin dari keluarga., dan c). tinggal di desa bersifat sementara karena menunggu masa panen atau masa tanam.

Kondisi di atas sangatlah berlawanan terhadap fenomena yang terjadi di kota dan kecenderungan pelakunya para urban dan

kelompok usia produktif, antara lain : a). pemuda ngamen dijalan di kawasan perkotaan., b). banyak glandangan dan pengemis yang terlantar di jalan., c). terjadi kasus pencurian, perampokan dan sejenisnya., d). tumbuh suburnya perilaku dan pengkonsumsi napza, mabuk-mabukan dan sejenisnya., e). munculnya fenomena perkosaan, perilaku sex bebas dan pelecehan sex lair termasuk berkembangnya bisnis seks., dan f). peminat generasi muda menjadi TKW dan TKI semakin meningkat.

Fenomena di atas tumbuh subur hampir merata diseluruh perkotaan Indonesia, pertanyaanya adalah mengapa pemuda desa begitu mudah tergiur ke kota untuk melakukan pilihan hidup yang sebagian bersebrangan dengan berbagai norma kemasyarakatan, norma sosial, norma agama, dan norma hukum yang berlaku di negara kita? Situasi ini dapat kita buktikan diwilayah kabupaten-kabupaten dimana kapuaten tersebut memliki wilayah pedesaan yang ditingalkan pemudanya pergi merantau ke kota sehingga situasi desa seolah tidak memiliki penduduk kelompok pemuda, di antaranya Gunung Kidul DIY, Kabupaten Sangau di Kalimantan Barat, Kabupaten Magetan di Jawa Timur, Kabupaten Garut di Jawa Barat, Kabupaten Nagakeo di Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Empat Lawang di Sumatera Selatan, Kabupaten Konawe Utara di Sulawesi Tenggara, dan masih banyak wilayah perdesaan di bawah kabupaten yang lain.

Kondisi di atas menunjukkan seolah-olah desa tidak memiliki power untuk menahan generasi muda melalukan urbanisasi, hal ini sangat membahayakan desa dan bangsa Indonesia jika pemuda sebagai salah satu stakeholder bangsa terbawa arus berstigma sentiment terhadap desa, fenomena ini perlu kita renungkan secara mendalam "refleksi pemuda dan desa" perlu ditata ulang. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangnya yang berusia 16 sampai 30 tahun (pasal 1 UU RI Nomor 40 tahun 2009), pertumbuhan manusia pada usia 16-30 tahun merupakan masa produktivitas dan masa energik disegala aspek kehidupan, termasuk didalamnya semangat dan membentuk jati diri. Hal ini dapat kita buktikan bahwa pemuda selalu memiliki andil besar terhadap bangsanya. Andil pemuda dalam perjalan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dapat disimplikasikan pada tiga hal sebagai berikut :

1. Pelaku perintis pergerakan kebangsaan Indonesia, di era ini pemuda berperan aktif sebagai ujung tombak dalam menghantarkan bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat, tahapan ini diawali dengan kongres pemuda hingga mencapai titik kulminasi Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, yang berlanjut terus sampai mewujudkan Proklamasi 17 Agustus 1945.
2. Pasca Proklamasi dalam pembaharuan dan pembangunan bangsa Pemuda memiliki fungsi dan peran strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran dan pemberdayaan.
3. Memiliki fungsi kontrol terhadap stakeholder bangsa yang dalam mengemudikan NKRI lepas dari akar budaya bangsa, sehingga pemuda memiliki peran penting saat masa reformasi dan melibatkan diri mengakhiri masa orde baru.

Atas tiga hal di atas maka pembangunan bangsa dalam rangka sustainability dalam wadah NKRI membutuhkan pemuda sebagai penerima estafet kepemimpinan bangsa. Pelajaran berharga dari tiga hal di atas adalah merupakan hal yang positif yang harus dilestarikan dan melekat dalam kalenderskop sejarah bangsa Indonesia.

Disisi lain fenomena sikap negatif pemuda Indonesia muncul sejak tahun 1965 yaitu ada sebageian kelompok pemuda yang mengikuti aliran kiri seperti PKI, dalam perjalanan selanjutnya muncul kelompok pemuda yang mengembangkan sukuisme, ras dan keagamaan. Fenomena ini ditandai dengan tuntutan kemerdekaan untuk wilayah tertentu yang menginginkan pisah dari NKRI seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dan sebagai bukti kongkrit pada tahun 1999 Propinsi Timor-Timur telah di syahkan melalui Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 Tentang Penentuan Pendapat Di Timor Timur syah memisahkan diri dari NKRI menjadi Negara Timor Lisle. Dua peristiwa ini peran pemuda sangat tinggi dan nyata sebab sebagian besar pelaku GAM dan gerakan Timor-Timur Medeka adalah para pemuda. Peristiwa PKI tahun 1965, GAM, dan lepasnya propinsi Timor-Timur menjadi negara Timor Lisle tidak lepas dengan kepentingan politik, jika kepentingan politik kita runut membuktikan bahwa para pemuda di daerah dan pemuda dalam arti kelompok merasa tidak terpenuhi kebutuhannya dan ada

kelompok-kelompok kepentingan lain yang sama-sama menuntut dan tidak puas terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh pemerintah. Selain tiga hal di atas masih banyak catatan lain mengenai sikap-sikap negatif dalam rangka kepentingan politik tertentu yang berangkat dari masalah kecil dan berdampak menjadi sangat besar.

Kembali merujuk artikel di atas mengilustrasikan bahwa desa sebagai satuan masyarakat terkecil yang memiliki peran dan fungsi strategis bagi bangsa, maka jika desa-desa di Indonesia tidak mendapat layanan yang baik dari negara maka mereka akan mengambil sikap yang mengarah pada hal-hal yang tidak menguntungkan bagi desa seperti gerakan perubahan, demonstrasi, urbanisasi dan contoh beresiko politik adalah menuntut kemerdekaan seperti yang dilakukan GAM dan Timor Timur. Perjalanan bangsa Indonesia dari tahun 1945 sampai era global di awal abad 21 telah berganti kepemimpinan bangsa dari Soekarno, Soeharto, BJ. Habibie, Gusdur, Megawati dan Susilo Bambang Yodoyono. Pemuda selalu menjadi sasaran musuh bangsa Indonesia, terutama para musuh-musuh latten NKRI. Bentuk kongkrit upaya yang telah dilakukan oleh musuh latten NKRI selalu berupaya merusak atau menghancurkan pemuda Indonesia dengan kejahatan politik. Dalam kejahatan politik dapat ditemukan empat akar masalah dari perilaku menyimpang para pemuda Indonesia terletak pada narkoba, pornografi, adu domba dan tindakan kriminal.

## **B. Pembahasan**

Fenomena pemuda meninggalkan desa menuju ke kota merupakan gejala sosial yang didorong oleh peradaban manusia, perpindahan ini ada yang permanen, artinya pemuda nekat untuk menetap tinggal di kota, tetapi ada sebagian pemuda yang pindah tetapi non permanen artinya mereka tidak ada niat bertempat tinggal menetap di kota. Menurut Sugiyanto (1993:14) faktor yang mempengaruhi pemuda mengambil keputusan untuk melakukan mobilitas meninggalkan desa ada tiga, yaitu : 1). Faktor yang terdapat di daerah asal/desa, bila kita mengikuti aliran manajemen bahwa mutu merupakan kepuasan, atas teori ini maka dapat kita runut apakah masyarakat desa khususnya para pemuda meninggalkan desa menuju ke kota menunjukkan pemuda tersebut

tinggal di desa merasa dirinya tidak pernah mendapat kepuasan atas kebutuhan yang mereka rasakan. Artinya a). Belum semua stakeholder bangsa memandang pemuda sebagai aset bangsa yang positif dan strategis., b). Stakeholder bangsa belum mengenali akan kebutuhan pemuda yang bertempat tinggal dikawasan perdesaan., c). Stakeholder bangsa belum memenuhi kebutuhan pemuda yang bertempat tinggal di kawasan perdesaan. Atas tiga hal di atas maka pemuda yang bertempat tinggal di kawasan perdesaan cenderung menjatuhkan pilihan hidupnya migran ke kota. Apabila pemuda desa digambarkan sebagai konsumen maka siapa yang menjadi produsen yang menjual produk ke desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di desa?., 2). Faktor yang terdapat di daerah tujuan/kota, secara psikologis dan ekonomis pemuda berpersepsi bahwa kota lebih menarik, dan menjanjikan, karena di kota telah tersedia beragam pilihan fasilitas pendidikan, fasilitas bisnis, aneka warna lapangan kerja baik yang bersifat formal maupun non formal, bertebaran tempat hiburan dan tersedia fasilitas publik lainnya., 3). Faktor Rintangan, pemuda beranggapan bahwa jarak antar kota dengan desa tidak ada sesuatu yang merintanginya artinya keluar desa masuk kota dan sebaliknya sangat mudah dan cepat karena tersedia berbagai fasilitas transportasi, dan alat komunikasi yang begitu mudah dan cepat diakses.

Posisi pemuda sebagai warga masyarakat di desa yang dirinya merasa memiliki tekanan ekonomis dan tekanan psikologis, maka pemuda desa telah melakukan gerakan perpindahan dari desa menuju kota atau yang disebut dengan urbanisasi, sebenarnya banyak pihak yang berpengaruh dan berkepentingan terhadap gerakan pemuda meninggalkan desa, oleh sebab itu penulis berhipotesa apakah fenomena gerakan pemuda desa menuju kota dipengaruhi oleh aktor pemerintah, swasta dan tokoh agama yang ada kaitan terhadap kewajiban para aktor untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat desa?. Oleh sebab itu penulis mencoba melihat celah-celah relasi tiga aktor, yaitu pemerintah, swasta dan tokoh agama, apakah benar tiga aktor ini berpengaruh?.

### **1. Pemerintah**

Pemerintah merupakan sekelompok yang memiliki hak atas berbagai kebijakan dan memiliki kewajiban memberi pelayanan

kepada masyarakat, sejak republik ini merdeka sampai saat ini sikap adil pemberian fasilitas untuk masyarakat yang bertempat tinggal di desa dengan di kota belum menunjukkan keadilan. Sebagai contoh pembangunan cenderung bersentral di perkotaan, demikian pula lowongan kerja bagi kaum muda juga berpusat di perkotaan termasuk fasilitas lain seperti fasilitas pendidikan, hiburan, kesehatan, ekonomi dan sebagainya.

## **2. Swasta**

Aktor swasta merupakan kelompok pemilik modal mereka cenderung memberikan investasi kepada pemerintah dan masyarakat tetapi alokasi dan pengembangan investasi juga cenderung berlokasi diluar pedesaan, contoh investasi layanan publik yang dikelola pihak swasta seperti perumahan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya belum menunjukkan keadilan yang hakiki antara masyarakat desa dengan masyarakat perkotaan.

## **3. Tokoh agama**

Tokoh agama merupakan stakeholders bangsa yang menjadi aset bagi negara karena tokoh agama memiliki peran ganda sebagai panutan masyarakat dan sebagai tempat berlindung para pemilik modal/pihak swasta dan tempat berlindung sekaligus mitra bagi pemerintah, misalnya pemilik modal yang bergerak dibidang jasa boga akan selalu mengatakan halal produknya atas seijin tokoh agama sehingga pemilik modal berusaha bagaimana caranya agar masyarakat percaya terhadap produknya, demikian pula pihak pemerintah selalu berupaya melibatkan tokoh agama dalam mengambil beberapa kebijakan yang menyangkut masyarakat luas. Termasuk kebijakan-kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan penentuan lokasi, sasaran dan pemanfaatan seperti pembangunan rumah ibadah, sekolah berbasis religi, perbankan berbasis religi, dan rumah sakit berbasis religi yang berada di pedesaan dengan kawasan perkotaan sangat telak perbedaannya. Disisi lain banyak tokoh agama yang berasal dari desa, tetapi ketika tokoh agama mulai dikenal publik/naik daun mereka cenderung turut hijrah di kota-kota besar.

Pemerintah, swasta dan tokoh agama sampai hari ini masih terasa membedakan dalam memberikan pelayanan antara masyarakat kota dengan masyarakat desa, walaupun ketiga stakeholders belum tentu

memiliki sikap yang sama. dan ketiganya sebenarnya telah memahami konsep pembangunan dalam persepsi yang sama, yaitu "Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki kondisi agar lebih sejahtera"

Sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai saat ini pembangunan bangsa Indonesia yang dilakukan semua stakeholder tidak pernah mengalami berhenti, artinya pembangunan berjalan terus-menerus, tetapi angka kemiskinan Indonesia antara kota dan desa masih tinggi di pedesaan. Walaupun selama 65 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia telah memiliki empat pengalaman perubahan sebagai model pembangunan, keempat model tersebut sebagai berikut :

Model 1: Pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan atau Growth National Product (GNP) dan penanaman modal, orientasi model ini diharapkan mampu menjadi *trickle down effect* . Ternyata model pertumbuhan GNP dan penanaman modal mengalami kegagalan, sebab model ini mengabaikan pemerataan dan pemberantasan kemiskinan.

Model 2 : Pembangunan memfokuskan pada upaya pemerataan hasil-hasil pembangunan, diharapkan model ini memiliki dampak terwujudnya kemandirian dan keadilan sosial. Orientasi model kedua diharapkan mampu mendorong lahirnya ide-ide baru kearah pemberdayaan masyarakat, menciptakan paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia. Jadi inti model pembangunan ini dipusatkan pada manusia dan masyarakat, agar sumberdaya manusia menjadi berkualitas, sejahtera dan bermartabat.

Model 3 : Pembangunan yang ketiga cenderung berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada membangkitkan kesadaran dan kemampuan insani baik secara individu dan kolektive, model ini memandang kemiskinan sebagai kegagalan dalam pemenuhan hak-hak dasar manusia.

Model 4: Pembangunan mencoba merespon perubahan yang berbasis pada : a). Lingkungan, baik internal maupun eksternal, b). Dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, c). Globalisasi yang melahirkan harapan dan tantangan baru.

Pilihan-pilihan focus dalam setiap model pembangunan merupakan kebijakan yang menjadi prioritas pemerintah, dan

pemerintah pasti telah mempertimbangkan berbagai masukan baik dari pihak swasta, tokoh agama dan partisipasi masyarakat secara luas, sehingga kebijakan dimaknai sebagai ketentuan yang dijadikan pedoman atau pegangan dan petunjuk untuk menghadapi tuntutan, tantangan dan kendala yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Namun demikian pilihan model dan kebijakan belum mampu menjawab pemerataan pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat, sebaliknya setiap model memiliki kelemahan yang memancing lahirnya protes-protes masyarakat berbasis isu ketidakadilan, dari isu ketidakadilan pemerataan hasil pembangunan melahirkan permasalahan-permasalahan sebagai berikut : a). Tingginya tingkat pengangguran., b). Rendahnya kualitas ketrampilan dan produktivitas tenaga kerja., c). Masih terbatasnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat., d). Banyaknya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)., e). Tingginya tingkat kemiskinan.

Empat model yang pernah dilaksanakan di Indonesia selalu berdampak dan belum menunjukkan keadilan yang merata, sejauh aktor pembangunan bangsa tidak pernah berpihak kepada masyarakat desa khususnya para petani dan pemuda. Mengapa petani dan pemuda yang selalu penulis sebut, tekanan psikologis antara petani dan pemuda lebih besar dibanding kelompok-kelompok lainnya. Atas hal itu siapa saja manusianya yang menjadi stakeholder bangsa baik pemerintah, tokoh agama dan pihak swasta jika tidak pernah memiliki kepedualian terhadap petani dan pemuda selamanya masalah bangsa Indonesia tidak akan terselesaikan.

## **Alternatif Solusi**

Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak (UU Nomor 11 tentang Kesejahteraan Sosial), ternyata belum mampu diwujudkan oleh pemerintah. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya angka kemiskinan yang bertambah, penyandang masalah kesejahteraan sosial terus menerus bertambah dan ketidakadilan pembangunan antara kota dan desa bukan semakin sempit tetapi justru semakin meluas.

Permasalahan di atas dapat dicarikan alternatif solusi agar tidak berkepanjangan dan berdampak memperparah kondisi bangsa In-



donesia, penulis mencoba menawarkan berbagai alternatif sebagai berikut :

### 1. Pemerataan Pembangunan

Pembangunan merupakan proses perubahan yang direncanakan, ketiga stakeholder bangsa pemerintah, tokoh agama dan swasta siapapun orang yang menjabat seharusnya memperhatikan petani dan pemuda sebagai sektor penting, sebab sebagian besar penduduk miskin di Indonesia ada di desa dan berprofesi sebagai petani, demikian pula pemuda Indonesia sebagian besar di produksi di desa.

Problem yang dihadapi petani : Petani sebagai pemilik perusahaan yang seharusnya memiliki hak untuk menentukan harga hasil pertanian, sangatlah lucunya jika kita berbicara masalah petani Indonesia, sebab petani di Indonesia adalah pemilik perusahaan, tetapi petani menjadi *powerless* ketika musim panen hasil produksi pertanian yang menentukan harga pemerintah dan pihak swasta, disinilah letak ketidak berdayaan petani, dan selama ini pemerintah membiarkan begitu saja. Coba kalau kita menegok negara Jepang dan Thailand pemuda bangga menjadi petani sebab mereka melihat orang tuanya sebagai petani masa depannya jelas, kebutuhan ekonomi keluarga tercukupi dari hasil pertanian, dan mereka memiliki power untuk menentukan harga dari hasil produksi pertanian, sehingga petani di Jepang dan Thailand tidak pernah ada sejarah petani stres, bangkrut dan sebagainya. Di Indonesia justru para orang tua yang berprofesi sebagai petani tidak rela dan sedih jika anak-anaknya kelak menjadi petani, sebab petani di Indonesia masa depannya semakin tidak jelas, maka upaya orang tua mendorong anak-anak untuk keluar meninggalkan desanya untuk kepentingan studi dan mencari pekerjaan di luar sektor pertanian.

Kondisi di atas dirasakan sendiri oleh para pemuda-pemuda desa, sehingga para pemuda di desa tidak bersedia menjadi petani, sebab melihat orang tuanya yang menjadi petani selama ini tidak menjadi kaya tetapi menjadi miskin, sebab tanah pertaniannya semakin hari habis dijual untuk biaya pendidikan anak-anak dan memenuhi kebutuhan keluarga karena hasil produksi pertanian tidak menentu harganya.

Atas pengalaman dirinya para orang tua tidak rela anaknya menjadi petani karena kondisi sosial ekonomi bukan semakin baik, tetapi semakin memburuk sehingga orang tua di desa mendorong anaknya bekerja diluar sektor pertanian hal ini sangat berbeda dengan etnis Cina yang rata-rata bekerja seorang pedagang maka anaknya sebagian besar dipaksakan untuk menjadi pedagang sebab menjadi pedanag masa depan dapat menjajikan sebagai bukti di Indoensia pemangag besar saham perdagangan dikuasahi etnis Cina.

Akibat kurang kebijaknya pemerintah terhadap petani maka sikap orang tua di desa yang berprofesi profesi sebagai petani tidak pernah memaksa anak-anaknya untuk menjadi petani, sikap ini berdampak pada sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang membuka program studi pertanian semakin hari peminat semakin menurun, bahkan ada beberapa perguruan tinggi yang telah *operational close*.

Jika pemerintah masih mengharapkan Indonesia memiliki petani yang ulung dan pemuda mencitai profesi pertanian maka kebijakan pro desa dan petani tidak bisa ditawarkan lagi, mau tidak mau pemertaan pembagian untuk kawasan pedesaan kususnya untuk pertanian dan dan pemuda harus mendapat perhatian lebih, jika hal ini diabaikan maka tahun 2020 Indonesia lahan pertanian Indonesia akan habis atau terbengkelai, kekurangan bahan pangan dan pemuda desa semua akan hijrah menjadi buruh di negara lain.

## 2. Entrepreneurship

Enterpreneurship bukanlah *Knowledge* sebab *Knowledge* merupakan pengetahuan umum, yang mencakup segala hal. Tetapi entrepreneurship adalah *Knowhow*. *Knowhow* merupakan intelektualitas yang praktis, dalam bentuk kemampuan untuk berinovasi, membaca situasi secara riil, menangkap atau menciptakan peluang, mengolah asset, membuat perencanaan yang kalkulatif dan mencari solusi. Setiap enterpreneur harus *knowhow* karena mereka berupaya menjelmakan suatu konsep menjadi realitas, suatu peluang menjadi hasil, suatu potensi menjadi prestasi. *Knowhow* ini yang kurag diajarkan dalam kurikulum pendidikan Indonesia. Para pemimpin pemerintahan, dll. Orang yang sukses adalah orang memiliki *knowhow* yang besar. (Ciputra, 2008 : vii)

Pengalaman China, India, Korea Selatan, Singapur, Qatar, Brazil, Mexico, Afrika Selatan, Norwegia dll. Memiliki ekonomi besar yang berangkat dari kecil dan menengah dalam koridor entrepreneurship. Pada hal sumberdaya alam mereka kalah dengan sumberdaya Indonesia, mengapa demikian karena *Knowhow* lebih di kedepankan dari pada *knowledge*.

Kewirausahaan sebagai salah satu strategi menurunkan rasa sentimen/benci pemuda terhadap desa, menurut sugiyanto 2000:29 Kewirausahaan dapat mengubah situasi perdesaan pada ranah ekonomi, sosial, politik, dan hukum dengan demikian desa diperkuat dengan pertumbuhan ekonomi, sosial politik dan hukum maka rasa sentimentil pemuda akan menurun.

Setelah krisis berkepanjangan melanda Indonesia, pada tahun 1995 Presiden RI mengeluarkan Intruksi No. 4, tentang gerakan kewirausahaan. Namun gerakan itu belum mendapat respon dari stakeholder bangsa dan sekitar lima tahun terakhir ini kewirausahaan mulai mendapat tanggapan dari berbagai pihak seperti Perusahaan Ciputra dan Bank Mandiri yang menspon program wirausaha memalui perguruan tinggi dan usaha kecil menengah (UKM).

Untuk menciptakan gerakan pemuda cinta desa dan pertanian maka pemerintah harus memberikan kebijakan kepada petani dalam bentuk memfasiliatsi terbentuknya asosiasi-asosiasi petani yang benar-benar dikelola petani, dan mereka di beri power untuk menentukan harga dari hasil produksi pertanian, tidak lagi pemerintah dan swasta yang menentukan hasil pertanian. Jika wacana ini dapat dilaksanakan di tahun 2020 petani Indonesia akan terwujud kesejahteraannya sehingga pemuda desa tidak sentimen terhadap pertanian dan desa, hal ini akan berimbas sekolah dan perguruan tinggi yang memiliki program studi pertanian akan tumbuh dan berkembang kembali, maka akan relevan dengan pendapat Dino Patti Djalal dalam(Ciputra 2008 : vi), Generasi muda Indonesia adalah generasi yang sangat unik yaitu generasi pertama pada abad 20 melahirkan api nasionalisme Indonesia dan generasi kedua abad 21 melahirkan api *entrepreneurship*. Pendapat ini selalu di dengungkan pak Ciputra ketika bertemu dengan pendidik dan mahasiswa sebab menurut beliau mahasiswa adalah generasi muda yang sangat strategis untuk diajarkan enterpreneurship. Jika

pendapat pak Ciputra di atas dikawinkan dengan sumberdaya bangsa Indonesia yang sebagian besar berada di kawasan pedesaan maka keadilan dan kemakmuran ini akan kembali tubuh subur di bumi Indonesia.

### C. Penutup

Kita harus sadari bahwa desa merupakan ibu bagi bangsa Indonesia. Artinya seluruh bahan makan untuk bangsa Indonesia di produksi di desa, desa memiliki fungsi dan peran yang strategis, desa melahirkan beraneka sumberdaya bagi bangsa Indonesia dan desa melahirkan penduduk generasi muda yang lebih dominan dibanding dengan penduduk kota. Jika hal itu di sadari oleh *stakeholder* bangsa maka *stakeholder* bangsa tidak menunggu waktu segera mengambil sikap untuk berpihak kepada petani dan pemuda, sebab menurut pengamatan penulis dari masa lalu sampai saat ini ada kekuatan yang menjajah desa, baik dari dalam maupun dari luar, sehingga desa seolah tak berdaya dan miskin. Atas hal itu jika pemerintah berkeinginan menghapus kemiskinan dan sikap sintimen pemuda terhadap desa segera membuat kebijakan yang berpihak kepada deas khususnya petani dan pemuda, sebab kebijakan pemerintah selama ini ada sesuatu yang tidak signifikan terhadap peran dan fungsi desa khususnya bagi para petani dan pemuda.

Seandainya masyarakat desa yang berprofesi sebagai petani memiliki kemampuan *enterpreneur* dan diberi *power* oleh *stakeholder* bangsa dan negara memfasilitasi masyarakat desa seirama dengan kebutuhan dan potensi desa maka keadilan NKRI akan terwujud dan kemiskinan masyarakat akan menurun serta kepadatan penduduk kota akan merata bergeser ke desa, dampak dari kebijakan rasa sentimen pemuda terhadap desa akan berubah menjadi *internalization* desa bagi kaum muda. Mengapa hal ini penulis stressingkan sebab pemuda desa merupakan aset bangsa yang sangat tinggi nilainya, sehingga arah penyelenggaraan pembangunan kepemudaan harus dirumuskan ulang agar kebijakan pemerintah pusat lebih mudah diterjemahkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat desa khususnya petani dan pemuda

Sisi positif kepergian pemuda meninggalkan desa mereka bekerja dikota dan atau memilih melanjutkan studi di kota karena

tempat belajar di desa dipandang tidak memadai dan tidak sesuai dengan pilihan para pemuda, hal ini terjadi pada tempo-tempo tertentu seperti : a). Pasca hari raya Idul Fitri, maraknya pendatang baru di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bali dengan alasan di ajak teman atau anggota keluarga untuk mencari pekerjaan. b). Pasca pengumuman kelulusan siswa SMA/SMK, pemuda desa berbondong-bondong ke kota besar dengan dua alternatif, yaitu mencari perguruan tinggi di kota atau mengadu nasib mencari kerja dengan bekal ijazah SMA/SMK, sebagai contoh kota Yogyakarta yang mendapat predikat kota pendidikan setiap tahun ajaran baru rata-rata dibanjiri 40.000 pemuda/per tahun.

Fenomena di atas sesuai dengan paham Liberalisme disebarluaskan oleh Adam Smith pada tahun 1776 maka Kwik Kian Gie 2009 : 8 menyitir bahwa manusia adalah homo economicus yang senantiasa mengejar kepentingannya sendiri guna memperoleh manfaat atau kenikmatan yang sebesar-besarnya dari apa saja yang dimilikinya, jika karakter pemuda yang egosentris dan individualistik seperti ini dibiarkan tanpa campurtangan pemerintahan desa dan keluarga maka pemuda desa akan merugikan desanya, fakta ini sangat relevan dengan pendapat John Rawls, 1995 (72-74), bahwa keadilan di negeri ini belum terwujud sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, sebab keadilan memiliki dua prinsip, yaitu : 1). Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang., 2). Ketimpangan sosial dan ekonomi pasti diatur sedemikian rupa sehingga : a). Dapat diharapkan memberi keuntungan setiap orang, b). Semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Dengan demikian teori John Rawls sangat ironis dengan perjuangan petani dan pemuda desa yang pro pada anti korupsi, HAM dan pro demokrasi untuk menuntut keadilan. Dan sesungguhnya Peluang dan alternatif kewirausahaan di di desa sangat luas, jika kewirausahaan di desa ditumbuhkembangkan maka akan terjadi migrasi resultan sehingga kewirausahaan mampu menjadi fasilitas dan aksesibilitas desa menjadi kota.

#### D. DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Marhijanto, 1999 *Kamus Bahasa Indonesia Masa Kini*, Terbit Terang Surabaya.
- Ciputra, 2008, *Ciputra Quantum Leap "Entrepreneurship Mengubah Masa Depan Bangsa dan Masa Depan Anda"*, PT Elex Media Komputindo, Kompas Gramedia.
- John Rawls, 1995, *A Theory of Justice* Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.
- Kwik Kian Gie, 2009, *Indonesia Mengugat Jilid II?*, Penjabaran Proklamasi Calon wakil Presiden Boediono.
- Sudariyanto, 2009, *Memberdayakan Desa Dengan Uang Receh*, Minggu Pagi Edisi 1 bulan Juli, Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta.
- Sugiyanto, 1993, *Pengaruh Perilaku Mobilitas Sirkuler Terhadap Tingkat Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga*, STPMD "APMD" Yogyakarta.
- Sugiyanto, 2000, *Urbanisasi dan Kewirausahaan di Pedesaan*, Jurnal Ganesha Wacana Pembangunan volume II. No. 3, desember 2000 STPMD "APMD" Yogyakarta
- Sugiyanto, 2004, *SBY-Kalla Harus Prioritaskan Saluran Petani dan Pemuda*, Jurnal Empati Nomor 2/Tahun 1/2004, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, Yogyakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- UU Nomor 40 tahun 2009 Tentang Kepemudaan. Kementrian Pemuda dan Olahraga RI